



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : SP DIPA- 005.05.2.663251/2019**



DS:4401-4064-7250-3063

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 12 Tahun 2018 tentang APBN TA 2019

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
2. Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA
4. Kode>Nama Satker : (663251) PENGADILAN MILITER TINGGI II DI JAKARTA
- Sebesar : Rp. 264.430.000 (DUA RATUS ENAM PULUH EMPAT JUTA EMPAT RATUS TIGA PULUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

		Jumlah Uang
005.05.09	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)	Rp. 264.430.000
005.05.09.1058	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Rp. 264.430.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	264.430.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAKARTA VI (175) Rp. 264.430.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Jakarta, 05 Desember 2018
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 005.05.2.663251/2019
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:4401-4064-7250-3063

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (663251) PENGADILAN MILITER TINGGI II DI JAKARTA

Kuasa Pengguna Anggaran : Karsedi,S.H.
Bendahara Pengeluaran : Sultoni Mubin,S.H.
Pejabat Penanda Tangan SPM : Eva Morina,S.Kom

Halaman : IA.1

1 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN			264.430.000
Sub Fungsi	03.04	PERADILAN			264.430.000
2 Program	005.05.09	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)			264.430.000
Sasaran Program	01	Terselenggaranya Penyelesaian Perkara Yang Sederhana, Transparan dan Akuntabel di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara			
Indikator Kinerja Program	01	Perkara di Tingkat Pertama dan Banding di Lingkungan Peradilan Militer yang diselesaikan Tepat Waktu, Sidang keliling	3564	Perkara	
	02	Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan Tepat Waktu	2485	Perkara	
	03	Perkara yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara	41	Perkara	
	04	Masyarakat Penerima Layanan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara	8640	Jam Layanan	
Output Program	01	Putusan Perkara Pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding Tepat Waktu di Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara			
Indikator Output Program	01	Penyelesaian Administrasi Perkara di Tingkat Pertama dan Banding di Lingkungan Peradilan Militer Termasuk Penyelesaian Perkara Yang Kurang dari 5 (lima) bulan	3564	Perkara	
	02	Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Peradilan TUN	2485	Perkara	
	03	Perkara Yang di Selesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara	41	Perkara	
	04	Jam Layanan Pos Bantuan Hukum	8640	Jam Layanan	
Kegiatan	1058	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer			264.430.000
Sasaran Kegiatan	01	Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis dan Tertib Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Militer			
Indikator Kinerja Kegiatan	01	Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama dan Banding di Lingkungan Peradilan Militer secara Tepat Waktu			
	02	Layanan Dukungan Penyelesaian Perkara			
	03	Tenaga Teknis Yang Kompeten di Bidang Hukum dan Administrasi di Lingkungan Peradilan Militer			
Output Kegiatan	1058.001	Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Banding di Lingkungan Peradilan Militer yang tepat Waktu	125 Perkara		54.300.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Penyampaian Berkas Perkara Kasasi, PK dan Grasi Yang Lengkap dan Tepat Waktu	631	Berkas Perkara	
Output Kegiatan	1058.003	Layanan Dukungan Penyelesaian Perkara	1 Layanan		15.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Pedoman Tenaga Teknis dan Administrasi di Lingkungan Peradilan Militer	2	Layanan	
	02	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Peradilan Militer	0	Layanan	
	04	Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Layanan Peradilan	3	Layanan	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 005.05.2.663251/2019
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:4401-4064-7250-3063

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (663251) PENGADILAN MILITER TINGGI II DI JAKARTA

Kuasa Pengguna Anggaran : Karsedi,S.H.
Bendahara Pengeluaran : Sultoni Mubin,S.H.
Pejabat Penanda Tangan SPM : Eva Morina,S.Kom

Halaman : IA.2

Indikator Output Kegiatan	03	Pelaksanaan Akreditasi di Lingkungan Peradilan Militer	1	Layanan	
Output Kegiatan	1058.004	Sidang di Luar Gedung Pengadilan - Hakim Terbang	15 Perkara		195.130.000
Indikator Output Kegiatan	01	Perkara Peradilan Militer yang diselesaikan melalui Sidang di luar Gedung Pengadilan (Sidang Keliling / Hakim Terbang)	488	Perkara	

Jakarta, 05 Desember 2018
Direktur Jenderal Badimiltun

ttd.
Dr. MULYONO, S.H., S.IP., M.H.

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 005.05.2.663251/2019**



DS:4401-4064-7250-3063

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (663251) PENGADILAN MILITER TINGGI II DI JAKARTA

Halaman : I B. 1

1. Anggaran Tahun 2019	Rp.	264.430.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	Pagu	0	Rp.	Ekuivalen Rupiah	0
1. Rupiah Murni	Rp.	264.430.000		(2) RPLN	US\$		0	Rp.		0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$		0	Rp.		0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$		0	Rp.		0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR		0			
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR		0			
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR		0			
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR		0			

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 005.05.2.663251/2019
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:4401-4064-7250-3063

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (663251) PENGADILAN MILITER TINGGI II DI JAKARTA
Kewenangan : (KD)

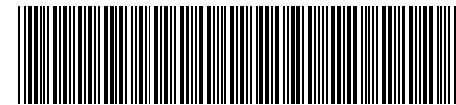
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
663251	PENGADILAN MILITER TINGGI II DI JAKARTA	-	264.430	-	-	-	264.430		
005.05.09	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)	-	264.430	-	-	-	264.430		
1058	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	-	264.430	-	-	-	264.430		
1058.001	Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Banding di Lingkungan Peradilan Militer yang tepat Waktu	-	54.300	-	-	-	54.300	01 . 51	
01	RM	-	54.300	-	-	-	54.300	175	
1058.003	Layanan Dukungan Penyelesaian Perkara	-	15.000	-	-	-	15.000	01 . 51	
01	RM	-	15.000	-	-	-	15.000	175	
1058.004	Sidang di Luar Gedung Pengadilan - Hakim Terbang	-	195.130	-	-	-	195.130	01 . 51	
01	RM	-	195.130	-	-	-	195.130	175	
JUMLAH		-	264.430	-	-	-	264.430		

Jakarta, 05 Desember 2018
Direktur Jenderal Badimiltun

ttd.
Dr. MULYONO, S.H., S.IP., M.H.

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 005.05.2.663251/2019
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:4401-4064-7250-3063

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (663251) PENGADILAN MILITER TINGGI II DI JAKARTA

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	663251	PENGADILAN MILITER TINGGI II DI JAKARTA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	55.000	7.000	7.000	55.000	7.000	7.000	55.000	7.000	7.000	50.430	7.000	264.430
		52 BELANJA BARANG	0	55.000	7.000	7.000	55.000	7.000	7.000	55.000	7.000	7.000	50.430	7.000	264.430
	005.05.09.1058	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	0	55.000	7.000	7.000	55.000	7.000	7.000	55.000	7.000	7.000	50.430	7.000	264.430
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	55.000	7.000	7.000	55.000	7.000	7.000	55.000	7.000	7.000	50.430	7.000	264.430

Jakarta, 05 Desember 2018
Direktur Jenderal Badimiltun

ttd.
Dr. MULYONO, S.H., S.IP., M.H.

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 005.05.2.663251/2019
IV A. B L O K I R**



DS:4401-4064-7250-3063

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [663251] PENGADILAN MILITER TINGGI II DI JAKARTA

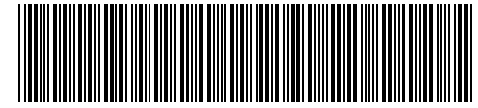
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 05 Desember 2018
Direktur Jenderal Badimiltun

ttd.
Dr. MULYONO, S.H., S.IP., M.H.

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 005.05.2.663251/2019
IV B. C A T A T A N**



DS:4401-4064-7250-3063

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [663251] PENGADILAN MILITER TINGGI II DI JAKARTA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 05 Desember 2018
Direktur Jenderal Badimiltun

ttd.
Dr. MULYONO, S.H., S.IP., M.H.